

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
DAFTAR PUTUSAN	xxx
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	10
1.6. Kerangka Teoritik	14
1.6.1.Kewenangan	14
1.6.2.Kontrak	19
1.6.3.Pertanggungjawaban	23
1.6.4.Keadilan	26
1.7. Metode Penelitian	38
1.7.1.Tipe Penelitian	39
1.7.2.Pendekatan Masalah	40
1.7.3.Sumber Bahan Hukum	42
1.7.4.Analisis Bahan Hukum	47

1.8. Sistematika Penulisan	48
 BAB II KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	
2.1.Konsep Hukum Perjanjian	49
2.2.Penerapan Prinsip Hukum Kontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	86
2.3.Kedudukan, Peran dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa	106
2.4.Perbandingan Pengaturan Kontrak Pengadaan di Indonesia, Amerika Serikat dan India	132
 BAB III TANGGUNGJAWAB PRIBADI ATAU JABATAN PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	
3.1.Konsep Hukum Administrasi	138
3.2.Pengadaan Barang/ Jasa dalam Hukum Administrasi.....	139
3.3.Tanggungjawab Pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	142
3.4.Tanggungjawab Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	152
 BAB IV BATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	
4.1.Konsep Hukum Pidana	160
4.2.Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	168
4.3.Pertanggungjawaban Pidana Korupsi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	196
4.4.Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	221
4.4.1.Putusan Nomor : 457 K/Pid.Sus/2012	221
4.4.2.Putusan Nomor : 1287 K/Pid.Sus/2013	230
4.4.3.Putusan Nomor : 2543 K/PID.SUS/2013	240
4.4.4.Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby	251

4.4.5.Putusan Nomor : 606 K/Pid.Sus/2014	260
4.4.6.Putusan Nomor : 918 K/Pid.Sus/2014	268
4.4.7.Putusan Nomor : 8/TIPIKOR/2016/PT.BDG	283
4.5. <i>Ius Constituendum</i> Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	299
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	
5.2. Saran	
	319
 DAFTAR BACAAN	
	321

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 1958/127 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975;

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976;

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang penyempurnaan Keppres No. 16/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 24/1995 tentang APBN;

- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor :457 K/Pid.Sus/2012;

Putusan Nomor : 1287 K/Pid.Sus/2013;

Putusan Nomor : 2543 K/PID.SUS/2013;

Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby;

Putusan Nomor : 606K/Pid.Sus/2014;

Putusan Nomor : 918 K/Pid.Sus/2014;

Putusan Nomor : 8/TIPIKOR/2016/PT. BDG.